

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN 2020 – 2024**



Karanganyar, Oktober 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



LAMPIRAN :
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
POLRES KARANGANYAR
TAHUN 2020 – 2024



Karanganyar, Oktober 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KARANGANYAR



LAMPIRAN :
MATRIKS KERANGKA REGULASI
POLRES KARANGANYAR
TAHUN 2020 – 2024



Karanganyar, Oktober 2020

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1. Kondisi Umum	1
	2. Potensi dan Permasalahan	23
	a. potensi gangguan keamanan	23
	b. Analisis SWOT	31
	c. Permasalahan	41
BAB II	VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
	1. Visi	43
	2. Misi	43
	3. Tujuan	44
	4. Sasaran Strategis Sasaran Impact	44
	5. Sasaran Impact	44
	6. Penahapan Kebijakan	46
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	49
	1. Arah kebijakan dan Strategi Polda Jateng	49
	2. Arah kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar	58
	3. Kerangka Regulasi	68
	4. Kerangka Kelembagaan	77
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	82
	1. Target Kinerja	82
	2. Kerangka Pendanaan	85
BAB V	PENUTUP	96
	14. Kaidah Pelaksana	96
	15. Aunтификаksi & Distribusi	7

Lampiran : Matriks Kinerja dan Pendanaan Polres Karanganyar 2020-2024.

**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR
TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Di dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai

Sebagai alat negara, Polri dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polri juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polri ini menjadi acuan penyusunan Renja Polri, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri, serta kemudian diturunkan oleh segenap Satker Polri ke Renstra satkernya masing-masing.

Pembangunan Nasional Indonesia harus berkesinambungan dan menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia telah menetapkan dan merumuskan Visi "**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.**" Penjabaran dan tafsir dari Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan pembagian empat tahapan pelaksanaan, yaitu: RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Paradigma baru Polri sebagai lembaga sipil yang mandiri dalam bidang penegakan hukum, dijalankan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan agar Polri melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan. Pada hakekatnya organisasi Polri adalah sebagai organisasi jasa/pelayanan dan sekaligus sebagai organisasi kekuasaan (*power*) oleh karenanya dalam pelaksanaan tugasnya harus memenuhi standar hukum, profesional dan proporsional meskipun terdapat keterbatasan sumber daya (Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran).

Dalam pelaksanaan Renstra I tahun (2005-2009) Polres Karanganyar berusaha mewujudkan Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi prioritas pertama pada Renstra Polres Karanganyar Tahap I yang harus diwujudkan sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan

Tahapan Renstra II (2010-2014), telah melaksanakan pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan di Polres Karanganyar sebagai pelayan Kamtibmas menuju pelayanan prima, tegaknya hukum dan Kamtibmas yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Renstra Polres Karanganyar Tahap II Tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan *partnership building*, serta telah dijabarkan dalam program dan anggaran Polres Karanganyar.

Pelaksanaan Renstra Polres Karanganyar 2010-2014 sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan Kamtibmas, yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, Polres Karanganyar secara umum telah dapat mencapai sasaran-sasaran stretegis yang telah direncanakan dalam Renstra Polres Karanganyar 2010-2014.

Tahapan Renstra III (2015-2019) merupakan upaya untuk mencapai pola pelayanan publik yang unggul dengan memprioritaskan perubahan *mindset* dan *culture set* Polri dalam mewujudkan pelayanan prima sebagai upaya mencapai pelayanan prima yang unggul (*Strive for Excellence*) kepada masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakkan dan ketertiban hukum yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan budaya nasional unuk mewujudkan daya saing bangsa (*The Competitiveness of Nation*).

Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 juga merumuskan pentahapan kebijakan tahunan yang harus dilakukan Polri. Pada tahun 2015, Polri menetapkan kebijakan yaitu melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Dilanjutkan dengan fokus kebijakan untuk tahun 2016, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional

nasional. Kemudian di tahun 2017 kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Tahun 2018, kebijakan diarahkan untuk mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Kebijakan pada akhir periode perencanaan tahun 2019 yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatasus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.

Tahapan Renstra IV (2020-2024) merupakan Renstra akhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang sudah masuk pada tahap Excellence. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pematapan kelembagaan dan pelayanan Polri kearah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut mekipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan;

Grand Strategy Polri 2005-2025 yang saat ini tepat memasuki tahapan ke empat *Excelen* yaitu Polri menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas Dunia Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (*Nation Competitivenes*), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini. Penggelaran Polri dalam *Community Policing* yang berbasis pada semangat kemanusiaan yang berbudi luhur merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi manajemen *knowledge* dan teknologi dalam organisasi dan manajemen Polri.

Sebagai upaya untuk melanjutkan reformasi birokrasi polri sebagai salah satu program *good governance* dari negara yang saat ini telah dicanangkan kearah kebijakan strategis melalui program revitalisasi polri, yang terdiri tiga pilar,

yang

yang merupakan roadmap atau peta utama, yaitu: penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. Sehingga diharapkan dari adanya tiga pilar tersebut Polri mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan skala prioritas sehingga mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, professional, proporsional, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dibingkai dengan prinsip moral, etika dan etos kerja yang baik

Kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap IV *Excellence* yaitu melakukan keunggulan, kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti *extraordinary people* atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. banyak program kerja di berbagai organisasi baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses, disinilah pentingnya perubahan dan pembangunan mental. Hal ini sejalan dengan salah satu Visi-Misi Presiden Republik Indonesia yang mencanangkan program revolusi mental, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, sejalan dengan pencapaian sasaran strategi **Strive for Excellence** kita tidak boleh bekerja ala kadarnya. Untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang semakin kompleks maka Kapolri meluncurkan Program prioritas yaitu program kerja melalui *Commander wish* dan menekankan semboyan PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya).

Sebagai organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka Polres Karanganyar dituntut untuk berkinerja maksimal dalam menjalankan amanat tersebut. Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan total ada 23 (dua puluh tiga) buah Indikator Kinerja, capaian kinerja Polres Karanganyar dari awal tahun periode Renstra 2015-2019, yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Capaian

a. Capaian Kinerja Renstra Polres Karanganyar Tahun 2015-2019

1) Situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pelayanan prima Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pelayanan prima Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar bahwa capaian pada periode ini ada 6 (enam), yaitu Prosentase penurunan gangguan Kamtibmas, Persentase penyampaian SP2HP sesuai tahapan, Persentase perizinan yang tepat waktu sesuai SOP, persentase penurunan pelanggaran dan kejahatan di tempat umum, Persentase *Respon time* kehadiran Polri di TKP dan Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri. Capaian Kinerja pada sasaran strategis terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pelayanan prima Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar yaitu pada T.A. 2015 dengan target 73,50 % realisasi 95,00 % capaian kinerja 129,25 % dan pada T.A. 2016 dengan target 80,00 % realisasi -21,83 % capaian kinerja -27,29 % serta T.A. 2017 dengan target 121,83 % realisasi 134,91 % capaian kinerja 110,74 %. Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Optimalisasi kegiatan Kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing Fungsi dan Polsek Jajaran sesuai tugas pokoknya melalui penguatan harkamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sehingga dapat menunjang target penurunan gangguan kriminalitas, meskipun belum bisa mencapai target yang ditentukan;
- b) Adanya mapping/identifikasi potensi konflik sosial, meliputi inventarisasi potensi konflik, melakukan penelitian/pendalaman terhadap potensi konflik guna mengetahui akar masalah, merumuskan langkah-langkah pemecahan dan prioritas penanganan potensi konflik, serta mendorong peran Pemda. Toda, Toga, Tomas dan Pemangku Kepentingan terkait sumber konflik

- konflik untuk membentuk Forum Komunikasi guna penanganan potensi konflik;
- c) Program pemberdayaan terhadap potensi masyarakat, dengan harapan agar terjadi kemitraan yang kuat antara Polri dengan masyarakat, sehingga senantiasa terdorong untuk membantu atau bekerjasama dengan Polri, khususnya dalam hal menurunkan pelanggaran hukum;
 - d) Semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat tentang transparansi dalam penanganan kasus tindak pidana di Polres Karanganyar.
 - e) Meningkatkan kemampuan Personel Intelkam khususnya petugas pelayanan dengan mengikuti Latkatpuan petugas pelayanan serta mengikutkan personel tersebut dalam ujian sertifikasi bagi petugas pelayanan SKCK guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara tertulis/ terpasang papan petunjuk persyaratan, mekanisme, biaya / table7 baru dalam penerbitan Surat Catatn Kepolisian (SKCK), perijinan Pengpin dan Rekom Handak PNBPN;
 - f) Partisipasi aktif dari masyarakat apabila ada kejadian dan kesiapsiagaan anggota dalam menindaklanjuti laporan untuk mendatangi TKP. Namun masih ada kendala didalam pelaksanaan tugas Respon time di TKP yaitu adanya TKP yang sangat jauh dan akses jalan menuju TKP sulit, adanya TKP yang sudah tidak dalam keadaan semula. Dalam mengantisipasi kendala tersebut dengan melakukan pendataan laporan secara lengkap dan mendatangi TKP secepat mungkin
 - g) Optimalnya koordinasi dengan semua unit dapat memberikan dampak yang bagus atau maksimal dalam pencapaian target yang sudah ditentukan
- 2) Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara

negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar bahwa capaian pada periode ini ada 3 (tiga), yaitu Persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana, Persentase penurunan gangguan keamanan pada jalur dan pusat aktivitas masyarakat, Persentase penurunan tindak pidana Korupsi dan Narkoba, pencucian uang dan perdagangan manusia dan Persentase penurunan gangguan yang berimplikasi kontinjensi. Capaian Kinerja pada sasaran strategis meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar yaitu pada T.A. 2015 dengan target 66,67 % realisasi 89,00 % capaian kinerja 133,49 % dan pada T.A. 2016 dengan target 80,00 % realisasi -21,83 % capaian kinerja -27,29 serta T.A. 2017 dengan target 121,83 % realisasi 134,91 % capaian kinerja 110,34 %. Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) kesiapsiagaan personel di lapangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP akan memberikan peningkatan kinerja pengungkapan dan penyelesaian kasus termasuk terobosan dan inovasi dalam mengantisipasi perubahan pola kejahatan dikaitkan dengan pengembangan sumber daya yang dimiliki;
- b) Meningkatnya kemampuan penyidik/penyidik pembantu memahami perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana umum;

c) Penuntasan.....

- c) Penuntasan perkara - perkara tindak pidana khusus tunggakan yang ditangani Satreskrim Polres jajaran Polres Karanganyar melalui penyelenggaraan gelar perkara, dengan target 4 perkara per bulan;
 - d) Melaksanakan anev kinerja secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan) guna mengukur tingkat produktivitas dan mengetahui permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang ditangani Satreskrim Polres Polres Karanganyar;
 - e) menentukan kembali target penyelesaian perkara bidang Reskrimsus kasus penyelesaian perkara tindak pidana khusus per bulan dan untuk tingkat Polres minimal 6 (enam) kasus penyelesaian perkara tindak pidana khusus pada tahun 2018;
 - f) semakin meningkatnya koordinasi lintas sektoral dengan CJS (criminal justice system) dan instansi terkait dalam upaya penyelesaian kasus yang ditangani oleh Satresnarkoba Jajaran Polres Karanganyar.
 - g) Sinergitas dari seluruh elemen masyarakat maupun koordinasi dengan Instansi Terkait dalam hal upaya menanggulangi terjadinya gangguan yang berimplikasi kontijensi
- 3) Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terciptanya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar bahwa capaian pada periode ini ada 3 (tiga), yaitu Persentase produk intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam giat lintas sektoral, Persentase produk intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas dan Persentase Polres yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah. Capaian Kinerja pada

sasaran.....

sasaran strategis terciptanya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar yaitu pada T.A. 2015 dengan target 29 % realisasi 9,33 % capaian kinerja 32,12 % dan pada T.A. 2016 dengan target 32,67 % realisasi 27,00% capaian kinerja 82,64 % serta T.A. 2017 dengan target 38,00 % realisasi 36,47% capaian kinerja 95,97 %. Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Membangun kerjasama dan sinergi dengan masyarakat melalui pembentukan jaringan, pembinaan jaringan, dan penggalangan Intelijen dalam seluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat untuk mengetahui akar gangguan, gejala/potensi gangguan dan ambang gangguan di masyarakat;
 - b) Meningkatkan kegiatan Intelijen berupa Penyelidikan, Pengamanan, Pembentukan Jaringan, Pembinaan jaringan Intelijen dan Penggalangan Intelijen sebanyak-banyaknya dimasyarakat;
 - c) Melaksanakan Anev capaian kinerja produk-produk Intelijen yang digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya guna mengevaluasi hambatan-hambatan yang terjadi dan mencari solusi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Intelijen;
 - d) Strategi yang diterapkan pada masing-masing Polsek dengan menggunakan upaya pre-ventif, pre-emptif, dan represif guna mencegah adanya gangguan Kamtibmas dan sebagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Polres Karanganyar.
- 4) Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat

bahwa.....

bahwa capaian pada periode ini ada 2 (dua), yaitu Persentase penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa / kelurahan secara bertahap dan Persentase komunitas masyarakat dalam pemecahan masalah guna terciptanya Kamtibmas Capaian Kinerja pada sasaran strategis terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat yaitu pada T.A. 2015 dengan target 55,00 % realisasi 55,00 % capaian kinerja 100,00 % dan pada T.A. 2016 dengan target 60,00 % realisasi 60,00 % capaian kinerja 100,00 % serta T.A. 2017 dengan target 62,50 % realisasi 100,00 % capaian kinerja 160,00 % Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Memetakan dan menentukan target pada penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap tidak berjalan sesuai dengan fakta di lapangan dalam meningkatkan jumlah Bhabinkamtibmas di wilayahnya secara periodik dengan melaksanakan Anev kepada Bhabinkamtibmas (Binaan, Pantauan dan Sentuhan), Bhabinkamtibmas di wilayahnya tersebut mutasi maupun pensiun;
 - b) kesiapsiagaan personel Bhabinkamtibmas, keterpaduan dan penanganan masalah yang sistematis didukung SOP yang spesifik di lapangan dalam upaya peran Bhabinkamtibmas dalam pemecahan permasalahan.
- 5) Terjalinnnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Karanganyar secara berkelanjutan.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terjalinnnya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan bahwa capaian pada periode ini ada 2 (dua), yaitu jumlah

MoU.....

MoU / kerja sama Polri dengan organisasi dan instansi Pemerintah / Swasta, Jumlah kerjasama Polri dengan Pemda, Capaian Kinerja pada sasaran strategis terjalannya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Jawa Tengah secara berkelanjutan yaitu pada T.A. 2015 dengan target 15 MoU realisasi 3, MoU capaian kinerja 20,00 % dan pada T.A. 2016 dengan target 23 MoU realisasi 11 MoU capaian kinerja 47,43 % serta T.A. 2017 dengan target 14 MoU realisasi 13 MoU capaian kinerja 92,86 % Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Kesiapsiagaan personel Polres Karanganyar, keterpaduan yang sistematis di dukung SOP yang spesifik di lapangan dalam upaya melaksanakan MoU / kerja sama Polri dengan organisasi dan instansi Pemerintah / swasta;
 - b) Merencanakan, memetakan serta menentukan target kembali jumlah MoU / kerja sama Polri dengan organisasi dan instansi Pemerintah / swasta dengan melaksanakan ANEV setiap bulan;
 - c) Komitmen dari atasan serta terobosan kreatif dalam mencari informasi mengenai pelaksanaan kegiatan MoU dengan tujuan bersama;
- 6) Memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program *Decade of Action For Road Safety 2011-2020*.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program *Decade of Action For Road Safety 2011-2020* bahwa capaian pada periode ini ada 3 (tiga), yaitu Persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap 5 (lima) jenis pelanggaran lalu lintas dan Persentase penurunan jumlah laka lantas serta Persentase penurunan tingkat fatalitas korban laka lantas meninggal dunia Capaian Kinerja pada sasaran strategis Memantapkan keselamatan lalu lintas dalam

rangka.....

rangka mendukung program *Decade of Action For Road Safety* 2011-2020 yaitu pada T.A. 2015 dengan target 5,00 % realisasi 32,00 %, capaian kinerja 640 % dan pada T.A. 2016 dengan target 5 % realisasi -81 % capaian kinerja -1.620 % serta T.A. 2017 dengan target 0,50 % realisasi – 90,60 % capaian kinerja 18.120 % Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Sosialisasi dan binluh kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat melalui koran, radio dan media elektronik yang ada maupun kunjungan ke masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir, melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah melalui Polisi Sahabat Anak, melaksanakan giat Safety Reading kepada masyarakat yang bertujuan untuk dapat mengenalkan masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- b) Melaksanakan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas;
- c) Operasi Rutin, Operasi rutin lalu lintas dilaksanakan utamanya guna memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya. Pendekatan ini akan efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang lalu lintas. Penegakan hukum tidak harus berakhir pada tindakan tegas seperti tilang dan sebagainya namun bisa juga dikedepankan peringatan-peringatan dan himbauan sebagai penggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas;
- d) Meningkatnya kegiatan Dikmas Lantas di Polres Karanganyar, meningkatnya sarana dan prasarana jalan, tingkat kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sudah semakin meningkat, penggelaran personel di daerah rawan kecelakaan dan rawan kemacetan secara optimal, kegiatan Patroli di daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan secara rutin sudah terlaksana dengan baik, koordinasi antar *Stage Holder* bidang lalu

lintas.....

lintas berjalan dengan baik, penindakan pelanggaran penyebab laka lantas dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polres Karanganyar dan semua elemen berperan aktif baik masyarakat umum, instansi terkait maupun Polri selalu menggelorakan budaya tertib berlalu lintas.

- 8) Terwujudnya personel Polres Karanganyar yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan *Mind Set* dan *Culture Set*.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya personel Polres Karanganyar yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan *Mind Set* dan *Culture Set* bahwa capaian pada periode ini ada 4 (empat), yaitu Jumlah personel Polri yang memiliki standard kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, Penurunan sikap perilaku personel yang melanggar disiplin dan etika profesi, Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri dan Jumlah personel yang mengikuti Diklat peningkatan kemampuan profesionalisme personil Polri, Capaian Kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya personel Polres Karanganyar yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan *Mind Set* dan *Culture Set* yaitu pada T.A. 2015 dengan target 172 Pers realisasi 169 pers, capaian kinerja 98,26 % dan pada T.A. 2016 dengan target 105 pers realisasi 18 pers capaian kinerja 17,14 % serta T.A. 2017 dengan target 20 pers realisasi 24 pers capaian kinerja 120,00 % Capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mabes Polri khususnya mengenai jumlah peserta, ketentuan / persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang akan mengikuti standard kompetensi;
- b) Dalam menghadapi permasalahan anggota utamanya menekan pelanggaran baik dilakukan saat berdinam / diluar jam dinas sangatlah perlu dilakukan kegiatan tiblun secara konsisten atau

terus.....

terus menerus untuk menekan ruang gerak yang tidak patut dilakukan;

- c) Penerimaan anggota Polri menggunakan prinsip zero growth (menggantikan anggota Polri yang pensiun) dan kuota didik seleksi penerimaan anggota Polri ditetapkan oleh Mabes Polri;
- 9) Terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja Polres Karanganyar yang mantap dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja Polres Karanganyar yang mantap dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Clean Government bahwa capaian pada periode ini ada 2 (duat), yaitu persentase pelibatan Propam dalam layanan public dan persentase kepatuhan tata laksana administrasi aparatur Pemerintah, capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja Polres Karanganyar yang mantap dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Clean Government yaitu pada T.A. 2015 dengan target 75,00 % realisasi 57,00 % capaian kinerja 76,00 % dan pada T.A. 2016 dengan target 87,50 % realisasi 89,50 % capaian kinerja 102,29 % serta T.A. 2017 dengan target 90,00 % realisasi 87,50 % capaian kinerja 97,22 % capaian ini dipengaruhi oleh:

- a) Dalam penyusunan dokumen AKIP Polres Karanganyar telah disusun sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diperoleh hasil penilaian yang sangat baik (BB);
- b) Reviu keuangan tidak hanya sebagai peneliti untuk menyamakan persepsi antara keuangan dan bagren tetapi juga berperan sebagai konsultan yang berkaitan dengan anggaran untuk memperbaiki program dalam pelaksanaan kinerja yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya;
- c) regulasi pengawasan telah berjalan dan anggota yang mengawasi telah melaksanakan tugas sesuai SOP .

10) Terpenuhinya.....

- 10) Terpenuhinya usulan Alpakam / Almatsus Polri guna mendukung Tupoksi Polres Karanganyar.

Indikator yang terdapat pada dokumen Renstra Polres Karanganyar 2015-2019 untuk mencapai sasaran strategis terpenuhinya usulan Alpakam / Almatsus Polri guna mendukung Tupoksi Polres Karanganyar bahwa capaian pada periode ini ada 2 (dua), yaitu jumlah usulan pengadaan Alpakam / Almatsus Polri Polres Karanganyar yang terealisasi dan jumlah usulan pembangunan/renovasi Mako Kepolisian di Jajaran Polres Karanganyar yang terealisasi Capaian Kinerja pada sasaran strategis terpenuhinya usulan Alpakam / Almatsus Polri guna mendukung Tupoksi Polres Karanganyar yaitu pada T.A. 2017 dengan target 2,00 % realisasi 2,00 % capaian kinerja 100,00 % Capaian ini dipengaruhi oleh keberhasilan tersebut juga berdasarkan giat Bimtek yang dilakukan oleh pembina fungsi perencanaan untuk memberikan pengarahannya bagaimana menyusun produk perencanaan yang baik dan benar sesuai peraturan;

- b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Polri di Polres Karanganyar

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri adalah merupakan organisasi Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden. Polri adalah alat pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi kewenangan antara lain:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan;

3) Membina.....

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Kabupaten Karanganyar dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri. Wilayah hukum Polres Karanganyar dibagi secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian

Resor.....

Resor atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan terdapat Bhabinkamtibmas yaitu seorang Brigadir Polisi yang bertugas membina kemandirian dan ketertiban masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam perkembangannya, pengelolaan SDM Polri masih memiliki banyak kendala. Hal ini diakibatkan cakupan tugas dan layanan Polri di Polres Karanganyar yang sangat luas mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi sangat tinggi. Dengan cakupan tugas yang sedemikian luas, dan wilayah cakupan layanan yang meliputi wilayah hukum Polres Karanganyar mengakibatkan Polri secara kuantitas sangat kurang. Keberadaan Polisi masih belum dapat digantikan dengan teknologi.,

Pada sistem penganggaran, Polres Karanganyar telah menjabarkan pelaksanaan Renstra 2015-2019 dalam 9 (Sembilan) program dan tiga puluh tujuh kegiatan sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/179/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Sementara itu terkait dengan anggaran, dukungan anggaran Polres Karanganyar selama ini telah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran Polres Karanganyar selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai, sedangkan untuk Belanja Barang guna mendorong operasionalisasi pelaksanaan tupoksi, dukungan anggaran bagi Polres Karanganyar justru dirasakan masih sangat terbatas.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), Polres Karanganyar berusaha melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri guna menghadapi segala tuntutan tugas Polri dan untuk mencapai rasio polisi ideal. Saat ini jumlah personel Polres Karanganyar sebanyak 825 orang terdiri dari Polri sebanyak 782 orang dan PNS Polri sebanyak 43 orang dengan rasio perbandingan 1 : 1.180, berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebanyak 949.741 orang, sehingga masih jauh dari ideal yang.....

yang seharusnya 1 : 500. Dalam rangka mencapai jumlah ideal maka Polres Karanganyar melakukan strategi rekrutmen penambahan anggota Polri dengan mengutamakan putra daerah (prinsip *local boy for local job*) yang dilaksanakan sepanjang tahun, dengan memanfaatkan sekolah unggulan melalui penyelarasan waktu kelulusan sekolah dengan pelaksanaan pendidikan pembentukan di lingkungan Polri. Rekrutmen anggota Polri dijarah dari calon-calon yang berkualitas, baik secara kesamaptaan jasmani, moral kepribadian, maupun intelektual, melalui proses *werving* yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah bijak Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern, serta menjunjung tinggi HAM, Polres Karanganyar telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Polri, antara lain dengan: membangun sarana kepolisian yang *soft power* dan tidak melanggar HAM; membangun layanan *contact centre* 110; mendapat tambahan Ranmor operasional maupun ranmor khusus; melakukan pengadaan peralatan Dalmas, diantaranya *security barrier*; membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekati Polisi dengan masyarakat termasuk pembangunan Polsek. Polres Karanganyar telah melakukan regulasi sesuai Perpres 70 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *e-proc* mulai Tahun 2012 hingga sekarang dengan menggunakan aplikasi LPSE Polri di semua bidang pengadaan antara lain : pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan Kapor Polri dan pengadaan jasa lainnya, adapun selain pelaksanaan pengadaan barang/jasa Polres Karanganyar juga telah mendistribusikan kebutuhan sarana dan prasarana Polri antara lain: Kapor, BBM, amunisi, Ranmor dan kebutuhan lainnya ke satker jajaran Polres Karanganyar.

Sementara itu, di bidang pelayanan publik sebagai pelaksanaan *quick wins* seperti pelayanan Samsat keliling, SIM keliling, Samsat *corner*, Samsat *on line system*, Samsat *delivery*, Samsat *payment point*, komputerisasi BPKB Satlantas Polres Karanganyar dan seluruh kantor pelayanan BPKB dan Samsat *drive thru*,

STNK.....

STNK, *road safety*, *quick respon*, olah TKP, inspektur tangkas, SP2HP, SKCK, Sambang Nusa, Brimob Nusantara, Akses transparansi *online*, hukum kepolisian *online*, IPTEK POL *online*, serta mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah terbangun dan tersedia di Polres Karanganyar.

Sementara itu, dalam upaya menangani potensi-potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti: fanatisme aliran/agama, masalah politik, masalah agraria, sengketa sumber daya alam, dan lain sebagainya, Polres Karanganyar ternyata belum optimal dalam mewujudkan sinergi polisional dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada.

Di bidang SDM, Polres Karanganyar menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: penambahan dan penyusutan personel yang masih tidak seimbang; kualitas SDM Polri yang belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang diharapkan; dan kesejahteraan personel Polri yang masih belum memadai. Sedangkan di bidang sarana dan prasarana, Polres Karanganyar masih menemui tantangan-tantangan antara lain berupa: masih banyak fasilitas Polri yang belum dibangun, bahkan sebagian masih menyewa, mengontrak atau meminjam; masih banyak bangunan Polri yang merupakan bangunan lama atau tidak layak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat; serta banyak peralatan Polri yang sudah tidak layak pakai.

Di bidang anggaran, dukungan anggaran bagi Polres Karanganyar yang berupa belanja barang untuk mendukung Tupoksi Polri masih minim sehingga mengakibatkan pelaksanaan Tupoksi selama ini tidak dapat terlaksana secara optimal. Tunjangan kinerja bagi personil Polri dengan beban dan tantangan tugas di lapangan yang semakin berat dan kompleks masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan K/L lainnya. Selain itu, belanja pemeliharaan yang tersedia dirasakan tidak memadai dikarenakan penambahan peralatan materiil dan pembangunan fasilitas Polri selama ini ternyata tidak diimbangi dengan penambahan anggaran belanja pemeliharaan tersebut.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas), yaitu:

a. Menghadirkan

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif;
- b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;
- i. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Posisi Polri dari aspek kelembagaan dan struktural dalam Nawa Cita di atas adalah menghadirkan negara (melalui Polri) untuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga negara. Penjelasan berikutnya terdapat pada Nawa Cita huruf b dan d, yang secara jelas dan kongkrit menjelaskan Tupoksi Polri dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Namun, pada dasarnya, peran Polri dalam program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak terbatas pada butir a, b dan d, akan tetapi seluruh upaya pembangunan ekonomi domestik maupun internasional harus didukung dengan menciptakan keamanan dan rasa aman.

selaras.....

Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemulihan kepercayaan publik, maka Polri melakukan pembinaan mental dan disiplin terus menerus di kalangan para anggotanya, dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan polisi yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan kamtibmas, melakukan evaluasi perundang-undangan terkait, berbasis pada arah kebijakan penataan Polri menjadi institusi profesional, dan menyediakan anggaran yang memadai baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota Polri.

Oleh karena itu Polres Karanganyar akan mengoptimalkan pelaksanaan 11 (sebelas) Program Prioritas Kapolri dan 8 program Quick Wins Polri Tahun 2020 – 2024 dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, terdiri dari :

- a. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila;
- b. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme;
- c. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;
- d. Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus ISIS);
- e. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Polres, Polda, Mabes Polri);
- f. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
- g. Pembentukan tim internal anti korupsi (Saber pungli);
- h. *Crash* program pelayanan masyarakat : pelayanan bersih dari percaloan.

Polres Karanganyar ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin kompleks dan mengarah pada *transnational crime* (kartel, *bioterrorism*, *narcoterrorism*, *cyber crime*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi Tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut.....

tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan berpotensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan Kamtibmas.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Perkembangan Aspek Kehidupan

a) Kondisi geografis, Demografis dan Sumber Daya Alam

(1) Geografi :

(a) Kabupaten Karanganyar terdapat gunung berapi yang sdh mati yaitu Gunung Lawu, wilayah kabupaten terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah..

(b) Kabupaten Karanganyar sebagai daerah perbatasan antara Propinsi dengan Propinsi Jawa Timur.

(c) Kabupaten Karanganyar terletak antara 110°40'-110°70' dan 7°28'- 7°46'Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut engan temperatur 22-31 derajat celcius dengan batas wilayah Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di sebelah Timur, Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta di sebelah barat serta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan.

(d) secara.....

- (d) Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 6 Kota dengan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Karanganyar 773,78.
 - (e) Cuaca pada saat Kabupaten Karanganyar sedang mengalami musim hujan, ada beberapa daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir yang sewaktu-waktu akan terjadi apabila turun hujan lebat, diantaranya Wilayah Ngargoyoso, Tawangmangu.
- (2) Demografi.
- (a) Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar menurut data terakhir adalah 949.471 jiwa meliputi perempuan 466.585 jiwa dan laki-laki 473.357 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.227 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk yang cukup besar dengan heterogenitas yang cukup tinggi baik dari suku, agama, maupun adat memberikan konsekuensi logis terjadinya mobilitas orang/barang yang cukup tinggi pula.
- (3) Sumber Daya Alam.
- (a) Sektor pertambangan dengan kandungan sumber tambang, Dinas Pertambangan Kabupaten Karanganyar terus berupaya mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, utamanya bahan galian golongan C (pasir dan kerikil, pasir urug, tanah liat, tanah urug, andesit dan lainnya).
 - (b) Adanya sumber alam berupa sumber air bersih di Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu.
 - (c) Adanya hutan lindung di wilayah Kecamatan Tawangmangu yang merupakan hutan sarana penyangga dan penyerap air hujan untuk menghindari bencana.....

bencana banjir, namun keadaan saat sekarang sangat memprihatinkan banyak pohon yang ditebangi secara liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor dan kebakaran hutan dimusim kemarau.

b) Ideologi

- (1) Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta masih adanya kelompok radikal kanan yang belum bisa menerima Pancasila sebagai azas tunggal dalam berbangsa dan bernegara mereka tetap ingin mempertahankan syariat islam sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara, hal ini merupakan ancaman bagi keberadaan Ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan Dasar Negara Kesatuan RI, dengan dibubarkannya Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7), tidak ada lagi lembaga ataupun pihak lain yang berupaya untuk mensosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (2) Banyaknya pemahaman yang berbeda dalam aliran keagamaan membuat masyarakat kurang memiliki rasa cinta tanah air, dimana banyak masyarakat yang hanya memikirkan kelompok masing-masing, sehingga upaya bela Negara menjadi tergerus.
- (3) Adanya pengikut kelompok ISIS (Islamic State Irak and Syiria) yang ditandai dengan penangkapan beberapa terduga teroris yang merupakan warga Kabupaten Karanganyar dan beberapa kali juga dilakukan penangkapan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

(4) Adanya.....

- (4) Adanya tanda – tanda mulai bangkitnya Faham Komunis di berbagai media cetak dan elektronik, dimana Karanganyar merupakan salah satu Kota yang terdapat area Makam Tokoh PKI di Makam Ngaliyan Lalung Karanganyar yang pernah dikunjungi oleh pelaku sejarah Kabupaten Karanganyar.
- (5) Hadirnya Ormas Yasinda (Yayasan Indonesia Damai) yang masih melakukan kegiatan rutin, dimana Yasinda merupakan penjelmaan dari Yatain yang sudah dilarang di Kabupaten Karanganyar. Jika tetap melakukan kegiatan akan menimbulkan gejolak yang sama seperti beberapa tahun silam dimana Masjid yatain sempat dilakukan perusakan dan penyegelan oleh kelompok tak dikenal sebagai aksi protes karena Yatain dinilai menjadi aliran sesat, saat ini kurang mendapat perhatian dan langkah kongkrit dalam penanganan Ormas tersebut.
- (6) Hadirnya Aliran Jamiatul Muslimin beberapa tahun silam yang mengakui adanya Nabi Rochmat (Nabi Palsu) yang mengaku bahwa telah menerima wahyu dari Malaikat Jibril. Adanya Nabi palsu tersebut diketahui di wilayah Kecamatan Matesih dan wilayah Kecamatan Kerjo dapat berdampak meluas jika tidak mendapatkan penanganan yang konsisten dari pemerintah.
- (7) Adanya Masjid Jamaah Ahmadiyah di kawasan Blumbang Tawangmangu yang belum mendapatkan penanganan secara komtimyu dapat menimbulkan potensi konflik sosial dengan kelompok Islam garis keras yang merasa agamanya telah dinodai.

c) Politik

- (1) Aksi penyampaian pendapat dari masyarakat yang tidak puas dengan caleg dan presiden yang terpilih dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

(2) Pemilihan.....

- (2) Pemilihan umum di tahun 2019 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden secara langsung tentu akan berpengaruh terhadap situasi politik dalam negeri tidak terlepas di Kabupaten Karanganyar akan terkena dampaknya baik langsung maupun tidak.
- (3) ketidakpuasan Partai Politik maupun ormas terhadap kinerja KPU dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu baik pilleg maupun Pemilihan presiden di tahun 2019.
- (4) Konflik kepentingan antar partai politik serta antar pendukung akan melemahkan kondisi politik persatuan nasional, masih cenderung mengedepankan kepentingan kelompok;
- (5) Adanya kerawanan politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif tahun 2019 akan menjadi hal yang harus diantisipasi pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Karanganyar periode tahun 2020 – 2024;
- (6) Rendahnya tingkat pemahaman berpolitik bagi sebagian masyarakat dan fanatisme sempit dari kelompok/parpol serta konflik internal partai dalam menentukan calon bupati/walikota yang mana dapat menghambat proses demokrasi dan menghambat tahapan Pemilukada selain itu adanya kelompok mahasiswa yang responsif dan reaktif dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah yang merupakan kekuatan potensial sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok elite Parpol tertentu dalam mencapai tujuan politis.

d) Ekonomi

- (1) Permasalahan pengusaha dan karyawan maupun dampak industri terhadap alam maupun masyarakat akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan adanya aksi penyampaian pendapat dalam berbagai bentuk.

(2) Pengelolaan.....

- (2) Pengelolaan Obyek Wisata Grojogan Sewu yang masih dikelola oleh Kementrian kehutanan RI dimana hasilnya masuk ke dalam kas Negara serta pengelolaanya yang masih dalam tahap proses peralihan ke Pemkab Karanganyar.
- (3) Keresahan Masyarakat pelaku niaga, dimana hasil usaha menurun berdampak gulung tikar, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.
- (4) Kenaikan Tarif Dasar Listrik membuat Pengusaha mengurangi tenaga kerja/phk, akibat adanya hasil produksi yang tidak seimbang dengan biaya produksi, berdampak pengangguran bertambah dan rawan terhadap adanya tindak kejahatan.
- (5) Kenaikan TDL membuat Masyarakat lebih condong menarik arus listrik secara ilegal, sehingga kasus pencurian arus listrik meningkat dan membahayakan warga sekitarnya.
- (6) Adanya kebijakan kenaikan harga LPG membuat Pelaku usaha UKM memanfaatkan LPG 3 kg bersubsidi yang digunakan sebagai usaha, dimana akan berdampak terhadap persediaan LPG 3 kg bersubsidi di tengah masy berkurang / langka dengan harga yang cukup tinggi dan penyaluran LPG ukuran 3 kg tidak dapat tepat sesuai dengan sasaran, dan akan muncul penyimpangan dalam pendistribusian LPG;
- (7) Kesenjangan ekonomi yang mencolok di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hal ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh dan merangsang adanya upaya timbulkan gangguan Kamtibmas;
- (8) Masih tingginya angka pengangguran berpotensi munculnya tindak kejahatan dan aksi-aksi protes menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan rakyat kecil sebagai bentuk krisis kepercayaan kepada pemerintah, terutama kebijakan terkait BBM, gas dan kenaikan TDL;
- (9) Munculnya.....

- (9) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM (Hapus *Outsourcing* Tuntut Upah Manusiawi). Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditunggangi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas;
- e) Sosial Budaya
- (1) Konflik perusahaan dengan warga setempat akibat dari limbah ataupun dampak lingkungan.
 - (2) Permasalahan perusahaan dengan karyawan atas kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan karyawan yang kadang kurang mendapat perhatian pemerintah.
 - (3) Permasalahan pemancar / Menara Tower dengan masyarakat setempat terkait dengan kompensasi maupun penolakan warga dengan adanya Menara Tower tersebut
 - (4) Pembangunan sarana prasarana daerah yang kurang merata yang dilakukan oleh pemerintah
 - (5) Adanya permasalahan ormas Islam / Ormas lainnya yang mempunyai kepentingan kelompok masing – masing.
 - (6) Adanya tempat hiburan yang dianggap sebagai tempat maksiat yang mendapat perijinan dari pemerintah
 - (7) Kebijakan Sekolah gratis yang saat ini sudah terdapat pungutan karena pengelolaan sekolah Tingkat SMA dan SMK sudah diambil alih oleh Provinsi.
 - (8) Pelayanan Kesehatan yang belum maksimal membuat gejolak di masyarakat sehingga tidak yakin dengan janji – janji calon Kepala Daerah pada saat berkampanye.

f) Keamanan.....

f) Keamanan

- (1) Sasaran penembakan dan ancaman teror bom terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Pos-Pos Polisi melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek Vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan yang mungkin juga terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Adanya beberapa warga Kabupaten Karanganyar ex Napi teroris memungkinkan akan direkrut kembali oleh kelompok – kelompok baru maupun lama yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Aksi Pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan replika senjata (Softgun), pecah kaca mobil dan rumha yang ditinggal penghuninya masih akan mewarnai situasi keamanan di wilayah Kabupaten Karanganyar
- (4) Aksi tawur massa maupun main hakim sendiri masih sangat mungkin terjadi dimana adanya solidaritas fanatisme sempit serta adanya budaya-budaya kota yang kadang dibawa oleh para perantau yang tidak bisa diterima oleh warga masyarakat setempat terutama pada saat merayakan hari raya Idul Fitri dan perayaan Tahun Baru.
- (5) Masih adanya kemungkinan adanya imigran gelap yang bersembunyi di wilayah Kabupaten Karanganyar mengingat wilayah Kabupaten Karanganyar bergunung dan berbukit. Selain itu tempat dataran tinggi sangat dipilih oleh kelompok tertentu untuk melakukan latihan militer.
- (6) Perekrutan kelompok radikal oleh Paslon atau partai tertentu untuk mendukung salah satu Paslon dari parpol.

(7) Pengerahan.....

(7) Pengerahan/pemanfaatan pondok pesantren oleh Paslon / parpol, Mobilisasi masa ormas dan pondok pesantren oleh Paslon / parpol.

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Karanganyar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT yaitu:

1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Aspek legalitas, yaitu Kedudukan Polri sangat kuat karena keberadaannya dijamin di dalam konstitusi. Sebagai penjabaran konstitusi (UUD 1945), Polri mengemban tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya berlandaskan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Struktur Polres Karanganyar yang berjenjang tergelar hingga ke seluruh jajaran dengan struktur satu Polres, 17 Polsek.
- c) Personel Polres Karanganyar sebanyak 825 orang terdiri dari anggota Polri 782 dan 43 orang PNS;
- d) Kekuatan personel yang dimiliki Polres Karanganyar tergelar mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek, sesuai dengan struktur organisasi Polri yang baru. Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan pendidikan kejuruan secara berkesinambungan;
- e) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme, narkoba), sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

f) Dukungan

- f) Dukungan sarana dan prasarana Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti alat transportasi laut, transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana meliputi 8 unit Bangunan Kantor, 5 unit Rumah Dinas, 364 unit kendaraan umum, serta 557 pucuk senpi.
- g) Meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai Bag/Satfung hingg tingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan sub satuan kerja (subsatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;
- h) Meningkatnya dukungan anggaran Polres Karanganyar baik fungsi pembinaan maupun Opsnal sampai pada tingkat Polsek sehingga akan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- i) Adanya tunjangan kinerja dan *reward* yang diberikan kepada personel Polri Polres Karanganyar diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- j) Peningkatan kinerja anggota Polri khususnya dalam hal penanganan kejahatan baik pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat serta pemberian bantuan pada korban bencana alam sehingga menambah kepercayaan masyarakat, khususnya pada anggota Polri Polres Karanganyar dan jajaran;
- k) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat pesat, hal ini bisa dimanfaatkan

untuk.....

untuk mengembangkan inovasi pemanfaatan teknologi modern berbasis IT untuk mendukung tugas-tugas ke depan seperti *system filling and recording*, pengembangan *e-catpers*, pengembangan *e-office* dan lain sebagainya;

- l) Meningkatnya bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggota Polri dalam bentuk pelayanan pembuatan SKCK, Samsat keliling, SIM Keliling dan *drive thru*;
- m) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan kepada personel Polri Polres Karanganyar tentang perubahan *mind set* dan *culture set*;
- n) Meningkatnya pelaksanaan pelatihan fungsi baik pembinaan maupun operasional yang dilaksanakan oleh Bag SDM yaitu Latkatpuan untuk satfung jajaran Polres Karanganyar sehingga akan menambah pengetahuan dan kemampuan personel Polri Polres Karanganyar.

2) Kelemahan (*Weaknes*)

- a) Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar menurut data terakhir adalah 922.703 jiwa meliputi perempuan 466.585 jiwa (48,70%) dan laki-laki 473.357 jiwa (51,30%) dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar merupakan beban tugas Polri untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan, sementara jumlah anggota Polri sebanyak 782 orang dan PNS Polri sebanyak 43 orang dengan rasio perbandingan 1 : 1.180 sehingga dimungkinkan terjadi ketidak seimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- b) Reformasi di bidang kultural **belum** menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- c) Masih rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan bahasa asing (dihadapkan pada kejahatan transnasional yang meningkat), penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi.....

teknologi dan biokimia dibidang kriminalitas modern, dalam pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional;

- d) Masalah KKN masih menghantui di tubuh Polri terutama masih adanya persepsi tempat basah dan kering dalam pelaksanaan tugas, walaupun sedikit demi sedikit budaya tersebut mulai dihilangkan sebagai tujuan dari program perubahan *culture set* dan *mind set* di internal Polri;
- e) Masih rendahnya pemahaman anggota Polri Polres Karanganyar terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dan dalam kehidupan bermasyarakat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan, pengaduan, surat anonim dan SMS berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan perilaku negatif anggota Polri/PNS Polri;
- f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polres Karanganyar sampai tingkat Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri di lapangan;
- h) Masih kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Polsek-Polsek sehingga belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- i) Masih kurangnya peralatan teknologi yang dimiliki oleh Polres Karanganyar sampai ditingkat Polsek-Polsek dalam rangka menghadapi kejahatan yang semakin canggih serta personel yang menguasai teknologi juga terbatas;
- j) Adanya personel Polres Karanganyar yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri;

k) Masih.....

- k) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang disebabkan masih rendahnya kinerja personel di lapangan serta budaya anggota Polri yang masih arogan dan pelayanan yang belum maksimal kepada masyarakat;
 - l) Masih kurangnya peralatan di bidang kesehatan yang canggih di Poliklinik Polres Karanganyar yang dimiliki Polri untuk memenuhi pelayanan kesehatan personel Polri/PNS Polri dan keluarga sehingga Polri masih melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta, serta profesionalisme yang diberikan dalam pelayanan di bidang kesehatan masih belum maksimal;
- 3) *Peluang (Opportunity)*
- a) Pengembangan lembaga Polri yang berorientasi sipil dalam arti Polri yang bertanggungjawab melindungi kehidupan orang dan harta benda warga masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, menghormati HAM dan berbasis penyidikan ilmiah serta mempererat interaksi dengan semua potensi masyarakat untuk menjalankan fungsi Kepolisian;
 - b) Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kompetensi dan profesionalisme kinerja Polri ditengah kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan mendorong Polri memfokuskan rencana kerjanya pada upaya meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karanganyar;
 - c) Terbentuknya TMC (*Traffic Management Centre*) sehingga memudahkan Polri dalam memantau situasi dan kondisi lalu lintas jalan raya guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - d) Makin aktifnya kontrol eksternal dari kaum intelektual/kampus, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta LSM termasuk media massa merupakan kepedulian dari komponen masyarakat yang memotivasi.....

memotifasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri untuk semakin profesional;

- e) Terjalannya hubungan yang baik antara Polri dengan instansi terkait, termasuk unsur *Criminal Justice System (CJS)*, Pemkab, DPRD, TNI, perguruan tinggi dan LSM akan mempermudah pelaksanaan tugas Polri;
- f) Dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam upaya pemberian dukungan dana APBD dan hibah berupa gedung kantor kepada Polres Karanganyar dan jajarannya dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif;
- g) Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
- h) Adanya kegiatan pre-emptif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polres Karanganyar;
- i) Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja kepada seluruh personel Polri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan personel Polri dan keluarganya;
- j) Meningkatnya kinerja Polri khususnya Polres Karanganyar dan jajarannya terutama dalam menangani empat jenis kejahatan yaitu kejahatan transnational, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi membutuhkan penanganan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pembangunan sinergi kepolisian dengan lebih mendorong Polri dalam berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi yang diwujudkan dengan membangun kerjasama yang erat (*partnership*) dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi.....

menanggulangi kejahatan multi dimensi baik dengan masyarakat maupun instansi teknis pelayanan publik;

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euforia kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif), aliansi yang makin luas pada *white collar crime*, kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
- b) Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam dinamika kehidupan normal masyarakat baik di setiap tempat dan waktu memerlukan kehadiran Polisi yang cepat, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang terjadi maupun kebakaran atas ulah manusia;
- c) Gangguan Nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) tersebut di atas, sehingga menyulut tindakan kejahatan di tengah kehidupan masyarakat antara lain perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban masyarakat serta konflik dengan rekayasa provokator yang tergolong dalam empat jenis kejahatan yaitu pertama, kejahatan konvensional yang sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Kedua, kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologi yang mencekam yang berbentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang telah menimbulkan korban jutaan orang, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, pembalakan liar, penambangan liar dan perdagangan illegal lainnya. Keempat, kejahatan yang berimplikasi

berimplikasi kontinjensi, berdampak terganggunya keamanan secara meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangnya;

- d) Sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi-posisi kekuatan politik guna memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, serta kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan, yang dimungkinkan karena mendorong akumulasi perundang-undangan baru yang ternyata berakibat dapat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
- e) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- f) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di beberapa daerah tertentu yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- g) Kewenangan dan komitmen internal instansi terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih apabila tidak sekuat dalam penanggulangan kejahatan di perairan, pertambangan dan kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar;
- h) Meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat/ individu diantaranya kasus korupsi dan *money laundering*, dikarenakan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- i) Suasana.....

- i) Suasana kebersamaan dan persatuan belum sepenuhnya kembali pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana dengan adanya salah satu paslon yang menggugat hasil pemilu baik Pileg maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- j) Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Karanganyar memungkinkan adanya ekses-ekses berupa kekecewaan calon kepala desa yang gagal dalam perolehan suara sehingga hal ini dapat mempengaruhi stabilitas kamtibmas.
- k) Kebijakan pemerintahan yang baru juga dimungkinkan akan terganggu dengan kepentingan-kepentingan politik khususnya dari Parpol yang mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 sehingga dimungkinkan Parpol-Parpol tersebut akan melakukan koalisi antara Parpol yang kalah dalam Pemilu menjadi Parpol Oposisi yang dimungkinkan akan seringkali melakukan kritik dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan politik dan hukum yang benar di dalam negara demokrasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
- l) Penegak hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparaturnya penegak hukum, selain itu dimungkinkan masih akan terjadi matinya peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum, profesionalisme penegakan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- n) Penyebaran penduduk yang tidak merata (menumpuk di perkotaan) akan berpotensi terhadap berbagai permasalahan sosial dan keamanan dengan dimensinya yang kompleks dan luas, hal ini diperlukan kesiapan Polri dalam masalah pelayanan maupun dalam rangkaantisipasi gejolak sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan kamtibmas;
- p) Munculnya

- p) Munculnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih menyisakan polemik berkepanjangan karena dianggap merugikan kaum buruh khususnya terkait masalah HOSTUM. Keadaan tersebut dapat memicu munculnya aksi unjuk rasa yang dapat mengganggu kamtibmas terlebih apabila ditanggapi oleh kelompok elit politik maupun kelompok garis keras dengan maksud mengacaukan pemerintah dan Sitkamtibmas;
- r) Dengan adanya ketidakstabilan kenaikan bahan dasar produksi pangan/sembako, pengurangan subsidi BBM khususnya premium dan kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi infrastruktur ekonomi, industri, pangan dan taraf hidup masyarakat yang berdampak terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran hukum maupun tindak pidana baik secara perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kenaikan dan pengurangan subsidi BBM apabila terjadi kembali pada tahun 2015 sebagai akibat krisis ekonomi global mengakibatkan kerawanan dalam menentang kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan unjuk rasa yang mengarah kepada tindakan anarkis;
- s) Meningkatnya jumlah guru bantu/guru yang belum diangkat dengan tidak dibarengi untuk tingkat kesejahteraannya memicu timbulnya unjuk rasa dengan sasaran unjuk rasa hingga sampai tingkat pusat yang mengangkat isu tentang kesejahteraan guru yang kurang memadai dan masalah dana alokasi pendidikan sebesar 20 % dari APBN namun dalam realisasinya tidak sesuai hal ini masih akan tetap berlanjut mengingat belum ada solusi akan penyelesaiannya;
- t) Modus aksi penembakan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Pos-Pos Polisi dan ancaman teror bom melalui kiriman barang/paket ke obyek-obyek vital, sarana fasilitas umum maupun perorangan bahkan bom bunuh diri masih akan terjadi dan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun perorangan dalam upaya menciptakan instabilitas

keamanan.....

keamanan maupun upaya menciptakan keresahan masyarakat karena cara tersebut dianggap sangat efektif dalam upaya mencapai tujuannya;

- u) Kebijakan pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor tertentu dan kemudahan untuk memiliki kendaraan baru dengan cara kredit mendorong semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan, jika tidak diantisipasi dengan perubahan infrastruktur misalnya dengan pelebaran jalan dan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengguna jalan maka hal tersebut berpotensi munculnya kemacetan lalu lintas, kasus Laka Lantas dan pelanggaran lalu lintas;
- p) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi berdampak munculnya kejahatan jenis baru (*new type crime*) dan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*);
- w) Jumlah angka pengangguran setiap tahun semakin meningkat sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan Kamtibmas dalam menciptakan rasa aman, baik melalui dukungan anggaran maupun penggelaran personel dan peralatan yang berbasis teknologi di wilayah hukum Polres Karanganyar;
- 2) Pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara maksimal sehingga masih banyak komplain dari masyarakat;
- 3) Jumlah Bhabinkamtibmas definitif yang sudah ada di Polres Karanganyar belum bisa memenuhi program 1 (satu) Desa/Kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas dikarenakan tugas ganda sehingga belum mampu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberikan informasi secara maksimal.
- 4) Jumlah.....

- 4) Jumlah Polwan di Polres Karanganyar belum dapat memenuhi kebijakan 1 (dua) Polwan satu Polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;
- 5) Masih banyak potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pertanahan kehutanan, pertambangan (galian C), pembangunan obyek Vital, pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM, pilkades serentak, yang memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal;
- 6) Upaya penanganan, pemberantasan terorisme dan radikalisme yang masih ada di Kabupaten Karanganyar memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas;
- 7) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan kerugian material serta pelanggaran lalu lintas;
- 8) Kerjasama lintas sektoral belum optimal dikarenakan masih ada kerjasama yang dalam pelaksanaannya secara parsial (fungsi masing-masing) sehingga menimbulkan permasalahan Kamtibmas
- 9) Belum teroptimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Karanganyar baik kuantitas maupun kualitasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang maksimal;
- 10) Belum optimalnya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di jajaran Polres Karanganyar;
- 11) Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kemampuan personel Polres Karanganyar dalam pelaksanaan tugas secara profesional;
- 12) Belum terpenuhinya dukungan anggaran khususnya belanja barang dan belanja modal untuk mendukung pelaksanaan tugas yang optimal;
- 13) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih belum semua efektif terkait dengan HTCK maupun Analisis Beban Kerja (ABK).

BAB II

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN IMPACT DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polres Karanganyar menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Resor Karanganyar menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas.

1. Visi

- a. Visi Polda Jawa Tengah:
“Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman dan Tertib”
- b. Visi Polres Karanganyar
“Terwujudnya Kabupaten Karanganyar Yang Aman dan Tertib”

2. Misi

- a. **Misi Polda Jawa Tengah**
 - 1) melindungi;
 - 2) mengayomi;
 - 3) melayani masyarakat.
- b. **Misi Polres Karanganyar**
 - 1) melindungi;
 - 2) mengayomi;
 - 3) melayani masyarakat.

3. Tujuan

3. Tujuan

a. Tujuan Polda Jawa Tengah

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polda Jawa Tengah yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jawa Tengah;
- 5) menerapkan manajemen Polri Polda Jawa Tengah yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan Polres Karanganyar

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar
- 2) menegakan hukum secara berkeadilan
- 3) mewujudkan Polres Karanganyar yang profesional
- 4) modernisasi pelayanan Polres Karanganyar
- 5) menerapkan manajemen Polres Karanganyar yang terintegrasi dan terpercaya;

4. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polda Jawa Tengah

Mengacu kepada sasaran Impact Polri 2020-2024, maka sasaran Impact Polda Jawa Tengah 2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis Polda Jawa Tengah diantaranya:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jateng.
- 2) penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah.
- 4) Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah;
- 5) sistem.....

- 5) sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah.

b. Sasaran Strategis Polres Karanganyar

Mengacu kepada sasaran Impact Polda Jawa Tengah 2020-2024, maka sasaran Impact Polres Karanganyar 2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik yang unggul (*excellence*) adalah terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis Polres Karanganyar diantaranya:

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar..
- 2) penegakan hukum secara berkeadilan;
- 3) Profesionalisme SDM Polres Karanganyar.
- 4) Modernisasi teknologi Polres Karanganyar;
- 5) sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Karanganyar.

5. Sasaran Impact

a. Sasaran Impact Polda Jawa Tengah

Keterkaitan *sasaran Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah”, tujuan, dan sasaran strategis.

TUJUAN	SASARAN
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah
2. Menegakan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polda Jateng yang profesional	3. Profesionalisme SDM Polda Jateng
4. Modernisasi pelayanan polda Jateng	4. <i>Modernisasi teknologi Polda Jawa Tengah</i>
5. Menerapkan manajemen Polda Jateng yang terintegritasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah

b. Sasaran

b. Sasaran Impact Polres Karanganyar

Keterkaitan *sasaran Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten karanganyar”, Tujuan, dan sasaran strategis.

TUJUAN	SASARAN
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar
2. Menegakan hukum secara berkeadilan.	2. Penegakan hukum secara berkeladilan
3. Mewujudkan Polres Karanganyar yang profesional.	3. Profesionalisme SDM Polres Karanganyar
4. Modernisasi pelayanan Polres Karanganyar	4. Modernisasi teknologi Polres Karanganyar
5.. Menerapkan manajemen Polres Karanganyar yang terintegritasi dan terpercaya.	5. Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Karanganyar

6. Penahapan Kebijakan

a. Pentahapan Kebijakan Polda Jateng

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang terintegritasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almtsus Polri yang modern;

3) Tahun

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 23

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah

5) Tahun 2024

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polda Jawa Tengah yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

b. Pentahapan Kebijakan Polres Karanganyar

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres Karanganyar yang prima melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Karanganyar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almitsus Polri yang modern;

3) Tahun

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres Karanganyar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Karanganyar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5) Tahun 2024

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polres Karanganyar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

BAB III . . .

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jawa Tengah

a. Sasaran Strategis “**Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah**” dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut :

1) Peningkatan kehadiran Polri pada lokasi prioritas pengamanan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) Meningkatkan infrastruktur, SDM dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas pengamanan;
- b) Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas;
- c) Melaksanakan patroli perairan di pulau terluar/perbatasan;
- d) Melaksanakan pengamanan obyek vital tertentu;
- e) Meningkatkan kehadiran Polri pada lokasi pengamanan;
- f) Meningkatkan Kamseltibcar lintas pada lokasi prioritas pengamanan;
- g) Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah.

2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- b) Melakukan lidikpamgal terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

Meningkatkan

- c) Meningkatkan efektifitas dan penindakan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit tertentu;
 - e) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob Polda Jawa Tengah.
- 3) Peningkatan kualitas operasi Kepolisian pada lokasi prioritas pengamanan;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) Perkiraan Intelijen yang tajam;
 - b) Meningkatkan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - c) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;
 - d) Meningkatkan analisa dan evaluasi serta pemberian arahan tingkat kewilayahan;
 - e) Meningkatkan jumlah personel operasi Kepolisian di lokasi prioritas pengamanan.
- 4) Peningkatan keamanan Laut;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi tindak pidana di wilayah perairan, pulau terluar dan alur pelayaran, area labuh kapal serta mengungkap kejahatan di laut;

b) memberdayakan

- b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut di wilayah Jawa Tengah;
 - c) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Jawa Tengah.
- 5) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu :
- a. Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b. Meningkatkan Dikmas Lantas dan kampanye tertib lalulintas dengan memanfaatkan teknologi informasi;;
 - c. Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jawa Tengah melalui RTMC;
 - d. Melaksanakan operasi Kepolisian preventif dan represif (keselamatan, patuh, dan zebra) serta menggunakan E-TLE (Electronic Traffic Lawa Enforcement)
- 6) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka **strategi** Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif*” serta peran *mediasi*” dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
 - d) meningkatkan

- d) meningkatkan peran aktif Bhabinkamtibmas Candi (cerdas, agamis, negosiator, dedikasi dan inovatif) dalam *door to door* system dan problem solving di masyarakat.
- 7) melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polda Jawa Tengah;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
- b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu kamtibmas
- c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polseksampai tingkat Polda Jawa Tengah;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

b. Sasaran

b. Sasaran Strategis “**penegakan hukum secara berkeadilan**” dicapai dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengungkapan 4 kasus jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) dan terorisme yang akan menjadi atensi publik;
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan penegakan hukum;
 - b) mengikutsertakan pendidikan pengembangan spesialisasi Tindak Pidana Siber;
 - c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik, penyidik pembantu Siber maupun penyidik dan penyidik pembantu lainnya Polda Jawa Tengah guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - d) meningkatkan kerja sama nasional maupun regional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - e) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber, TP Konvensional, TP khusus maupun TP Kontijensi;
 - f) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD);
 - g) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);

2) Mendukung

- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker terkait Polda Jawa Tengah dan aparat penegak hukum;
 - b) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) mengoptimalkan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kualitas SDM Polda Jateng.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi

Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi secara profesional di bidang SDM;
- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polda Jawa Tengah dan calon anggota Polri yang siap kerja, siap pakai dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;

c) melakukan

- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik dan tenaga profesional lainnya di Polda Jawa Tengah serta penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber baik melalui sertifikasi mandiri maupun pengusulan pelatihan sertifikasi ke tingkat Mabes Polri;
 - d) meningkatkan kapasitas SDM Polda Jateng melalui *assessment* jabatan sampai dengan tingkat kewilayahan;
 - e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jawa Tengah.
- 2) pemindahan personel Polda Jawa Tengah ke Ibu Kota Negara Baru. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan pendataan personel Polda Jawa Tengah yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru dan mendata personel putra daerah ibu kota Negara baru yang bertugas di Jawa Tengah;
 - b) melakukan *road map* rencana kebutuhan personel dengan memperhatikan golongan kepangkatan di Polda Jawa Tengah yang akan mengisi personel Polri di ibu kota negara.
- d. Sasaran strategis **“Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jawa Tengah tahun 2020-2024 dalam rangka pemenuhan AlmatSus Polda Jawa Tengah;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai

Standar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Polda Jawa Tengah sampai Kewilayahan;

- 3) melakukan pengadaan kapal kelas B-1 dan C-1 dalam rangka mendukung kegiatan keamanan laut di Polda Jawa Tengah;
 - 4) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna membangun *smart security* di Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) mengusulkan pembangunan rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Jawa Tengah;
 - 6) mengusulkan pembangunan rumah sakit/layanan kesehatan bagi anggota Polda Jawa Tengah.
- e. Sasaran strategis **“Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polda Jawa Tengah”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Jawa Tengah;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal yang bisa diakses dengan mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk meniadakan penyimpangan dalam pelayanan Polri.
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memantapkan

- a) memantapkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
 - b) memantapkan sistem penerapan disiplin dan kode etik Polri;
 - c) melaksanakan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
- 3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jateng yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Jawa Tengah;
 - (3) penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Jawa Tengah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Jawa Tengah;
 - (2) menyusun dan menyiapkan dokumen/naskah LKIP Polda Jawa Tengah;
- 4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Jawa Tengah yang akan dilakukan yaitu:
- a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) menerapkan kerangka regulasi Polda Jawa Tengah;
 - (2) meningkatkan pengawasan dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;
 - b) Penanganan

- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) meningkatkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (E-Complain)* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) memperkuat peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Karanganyar

- a. Sasaran Strategis “**Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar**” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan kehadiran Polri pada lokasi prioritas pengamanan;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Mengusulkan peningkatan infrastruktur, SDM dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas pengamanan;
 - b) Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas;
 - c) Melaksanakan pengamanan obyek vital tertentu;
 - d) Meningkatkan kehadiran Polri pada lokasi pengamanan;
 - e) Meningkatkan Kamseltibcar lintas pada lokasi prioritas pengamanan;
 - f) Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah perbatasan wilayah Karanganyar.

2. pencegahan

2. pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- b) Melakukan lidikpangal terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- c) Meningkatkan efektifitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
- d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan objek tertentu;
- e) Penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas dan Samapta Polres Karanganyar.

3. Peningkatan kualitas operasi Kepolisian pada lokasi prioritas pengamanan;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) Perkiraan Intelijen yang tajam;
- b) Meningkatkan manajemen pelatihan praoperasi termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi Kepolisian;
- c) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan operasi Kepolisian, kegiatan Kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi Kepolisian;
- d) Meningkatkan analisa dan evaluasi;

e) Meningkatkan

- e) Meningkatkan jumlah personel operasi Kepolisian di lokasi prioritas pengamanan;
4. peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:
- a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- b) Meningkatkan Dikmas Lantas dan kampanye tertib lalulintas dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres TMC;
- d) Melaksanakan operasi Kepolisian preemtif, preventif dan represif (keselamatan, patuh dan zebra) serta menggunakan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
5. peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- c) *Partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif* serta peran *mediasi*" dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- d) Meningkatkan

d) Meningkatkan peran aktif Bhabinkamtibmas Candi (cerdas, agamis, negosiator, dedikasi dan inovatif) dalam *door to door* system dan problem solving di masyarakat.

6. melaksanakan “Efektivitas Operasional” kegiatan operasional Polres Karanganyar;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

a) Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polres Karanganyar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
- (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);

b) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut

- (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
- (2) menetralsisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas;

c) Penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
- (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres;

b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan

- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi) dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan penegakan hukum;
 - b) mengikutsertakan pendidikan pengembangan spesialisasi Tindak Pidana Siber;
 - c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik, penyidik pembantu Siber maupun penyidik dan penyidik pembantu lainnya Polres Karanganyar guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - d) meningkatkan kerja sama nasional maupun regional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - e) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber, TP Konvensional, TP khusus maupun TP Kontijensi;
 - f) menangani kekhawatiran penduduk keluar dimalam hari dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD);
 - g) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang Digital Forensik bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);

2) Mendukung

- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI);

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker terkait Polres Karanganyar dan aparat penegak hukum;
- b) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.

- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b) mengoptimalkan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
- c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

- c. Sasaran strategis "**Profesionalisme SDM Polres Karanganyar**" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) peningkatan kualitas SDM Polres Karanganyar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan reformasi secara profesional di bidang SDM;
- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polres Karanganyar dan calon anggota Polri yang siap kerja, siap pakai dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
- c) melakukan

- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik dan tenaga profesional lainnya di Polres Karanganyar serta penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber baik melalui sertifikasi mandiri maupun pengusulan pelatihan sertifikasi ke tingkat Polda Jawa Tengah;
 - d) meningkatkan kapasitas SDM Polres Karanganyar melalui *assessment* jabatan sampai dengan tingkat Polsek;
 - e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Karanganyar.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi Poles Karanganyar**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut: modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Karanganyar tahun 2020-2024 dalam rangka pemenuhan Almtasus Polres Karanganyar;
 - 2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Polres Karanganyar;
 - 3) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna membangun *smart security* di Kabupaten Karanganyar;
 - 4) mengusulkan pembangunan rumah dinas/flat bagi Pejabat dilingkungan Polres Karanganyar;
- e. Sasaran strategis “**Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Karanganyar**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu: peningkatan

pelayanan

pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Karanganyar;
- b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal yang bisa diakses dengan mudah;
- c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d) mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk meniadakan penyimpangan dalam pelayanan Polri.

2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) memantapkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
- b) memantapkan sistem penerapan disiplin dan kode etik Polri;
- d) melaksanakan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai dengan Polsek.

3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polres Karanganyar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mewujudkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Karanganyar;
 - (2) menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reuiu anggaran Polres Karanganyar;
 - (3) penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana.
- b) meningkatkan

b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Karanganyar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Karanganyar;
- (2) menyusun dan menyiapkan dokumen/naskah LKIP Polres Karanganyar;

4) melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif”;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Karanganyar yang akan dilakukan yaitu:

a) penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) menerapkan kerangka regulasi Polres Karanganyar;
- (2) meningkatkan pengawasan dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif;

b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) meningkatkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online (E-Complain)* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
- (2) memperkuat peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
- (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

c) Kerangka Regulasi

Polres Karanganyar dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Kerangka

Kerangka regulasi pada Renstra Polres Karanganyar berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Karanganyar yang bersifat mengikat kepada personel Polres Karanganyar maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Polri yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Karanganyar tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Kerangka.....

Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab		Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			Polda Jateng	Polres		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP;</p> <p>c. hasil reuiu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.</p>	Itwasda	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun;</p> <p>c. hasil reuiu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.</p>	Itwasda	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.

3. Peraturan

3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015;</p> <p>c. hasil reuiu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di</p>	Itwasda	Siwas		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP;</p> <p>c. hasil reuiu, menyusun perubahan Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016</p>	Itwasda	Siwas		Merubah Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kapabilitas APIP.
5.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reuiu di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid;</p> <p>b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reuiu yaitu reuiu PNBP, reuiu hibah, reuiu Renstra, reuiu Indikator Kinerja Utama;</p>	Itwasda	Siwas		Menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reuiu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru

c. hasil

		c. hasil revidu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Revidu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.				yang dibebankan kepada fungsi pengawasan.
6.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Itwasda	Siwas		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
7.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.
8.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.
9.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 Intelkam Polri.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
10.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam 10. Revisi

tentang

	tentang Pengamanan Intelkam Polri.					2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
11.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target penyelesaian tahun 2021.
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.
14.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi 14. Revisi Polri Nomor 2 Tahun 2012

Produk

	Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.					tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.
15.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
16.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.
17.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.
18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kepolisian tentang penyelesaian tahun 2023.

19. Peraturan

19.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
20.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Ditintelkam	Sat Intelkam		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
21.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
24.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	Ro SDM	Bag Sumda		
25.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		Ro SDM	Bag Sumda		
26.	Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	Revisi.	Ditreskrimum	Sat Reskrim	Pusiknas	
34.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian	Dilakukan proses	Rolog	Bag Sumda Subbag Log		

35. Perubahan

35.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor	Rolog	Bag Sumda Subbag Log		
-----	---	---------------------	-------	----------------------	--	--

d) Kerangka kelembagaan

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan perampingan dan penyederhanaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja personel Polri. Upaya penyederhanaan organisasi Polri perlu dilakukan sesuai kebutuhan Polri dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polri.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :

- a. Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- b. Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (*well-connected governance system*);
- c. Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polri.

Penataan

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polri dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat. Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Dalam rangka Penguatan Kerangka Kelembagaan Polres Karanganyar Tahun 2020-2024 melaksanakan :

- a. menyampaikan usulan/masukan terhadap penyempurnaan Peraturan Kapolri Nomor 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres Karanganyar antara lain:
 - 1) Subbaghumas pada Bagops menjadi Sihumas berdiri sendiri, jabatan PA Siaga dihapus;
 - 2) Penambahan Subbagstrajemen dan Subbag RBP pada Bagren;
 - 3) Subbagsarpras menjadi Subbaglog berdiri sendiri, Subbagkum berdiri sendiri, perubahan nomenklatur Bagsumda menjadi Bag SDM, Perubahan nomenklatur Subbaglog menjadi Baglog;
 - 4) Peningkatan

- 4) Peningkatan struktur Siwas menjadi Bagsiwas;
 - 5) Peningkatan struktur Sipropam menjadi Bagpropam;
 - 6) Pembentukan struktur Urwassidik pada Satreskrimum dan Satresnarkoba;
 - 7) Pembentukan struktur Satreskrimsus, penambahan struktur Urwassidik;
 - 8) Pembentukan struktur Unit Satwa pada Satsabhara;
 - 9) Perubahan nomenklatur Unit Laka menjadi Unit Gakkum;
 - 10) Pembentukan struktur Unit Pamtah (pengamanan tahanan) diemban langsung oleh Sattahti;
 - 11) Subbagkum berdiri sendiri tidak dibawah Bagsumda;
 - 12) Unit Reskrim dan Intelkam digabung menjadi Unit Resintel pada Polsek Prarural
- b. Penguatan satuan kewilayahan Polri di Polres Karanganyar disesuaikan dengan perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten Karanganyar, dengan mengusulkan:
- 1) Pembangunan Mako Polsek Karangpandan dan Mako Polsek Mojogedang
 - 2) Pembangunan Rumdin Jabatan Polres Karanganyar (Rumdin Pejabat);
 - 3) Peningkatan tipe Polsek Urban (Polsek Colomadu, Polsek Jaten, Polsek Karanganyar Kota,);
 - 4) Pembangunan gedung barang bukti Polres Karanganyar
- c. Melaksanakan pengkajian komposisi personel Polri pada Polres Karanganyar dan jajaran.
- d. Penyusunan Peraturan Kapolres Karanganyar tentang pokok-pokok HTCK di lingkungan Polres Karanganyar.
- e. Telah dilaksanakan evaluasi komposisi personel tingkat Polres ditinjau dari DSP, Riil dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Kerangka

Kerangka Kelembagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri 5052 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi Polri Polres dan Polsek.	Tk POLRES: Sesuai dengan kebutuhan Tk POLSEK: Polsek-Polsek		1 Polres		1 Polres	
			2) Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri	a) Peraturan Polri Nomor Perkap 23 Tahun 2020 tentang SOTK Polres dan Polsek b) Monev implementasi penataan daerah hukum (Polres, Polsek)			1		
		b. Penataan organisasi Tingkat Polres	1) Perubahan tipe Polsek	Polsek Colomadu Polsek Jaten Polsek Karanganyar		1	1	1	
			2) Pembukaan skeleton Satpamobvit Polres	Sesuai kebutuhan			1	1	
		c. Penataan organisasi tingkat Polsek	1) Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kinerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya			1 Polsek	1 Polsek	1 Polsek
			2) Penataan daerah hukum Polsek	Polsek-Polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya	4	3	3	3	4

d. Pembinaan

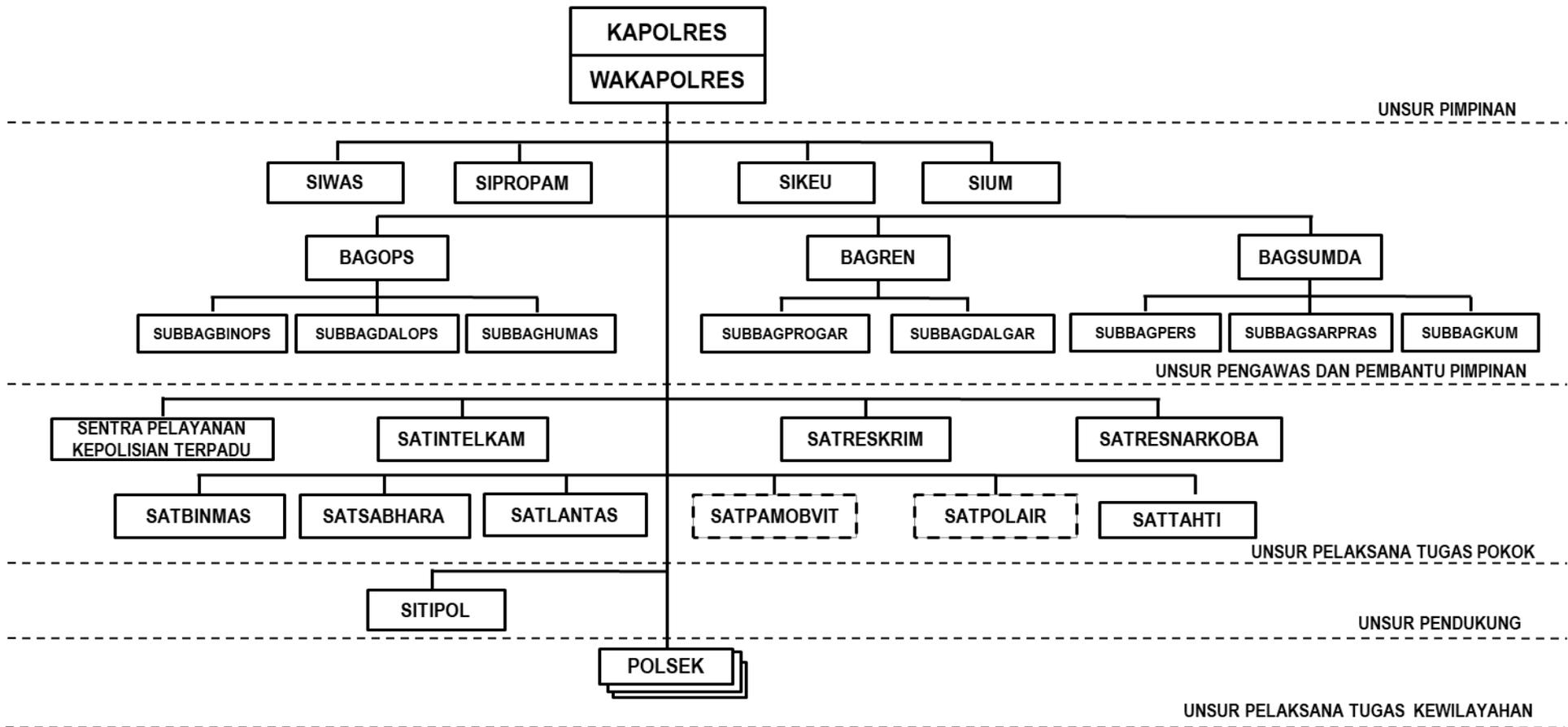
NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d.Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi	1) Penyusunan / Revisi Peraturan Kepolisian bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan perencanaan umum dan anggaran Polri					
			2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri					
			3) Pengkajian Sistem dan Metode di Lingkungan Polri	Validitas dan efektivitas peraturan kepolisian	1 Giat				
			4) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketetapan daerah hukum tingkat Polres	1 Giat				
			5) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketetapan daerah hukum tingkat Polsek	1 Giat				
			6)Pengkajian Klasifikasi Kestuan Kewilayahan Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	1 Giat				
			7)Pengkajian Klasifikasi Kestuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	1 Giat				
			8) Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polres dan Polsek	1 Giat				
			9) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polres dan Polsek	1 Giat				

10) Sosialisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN					
1	2	3	4	5					
			10) Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	1 Giat				

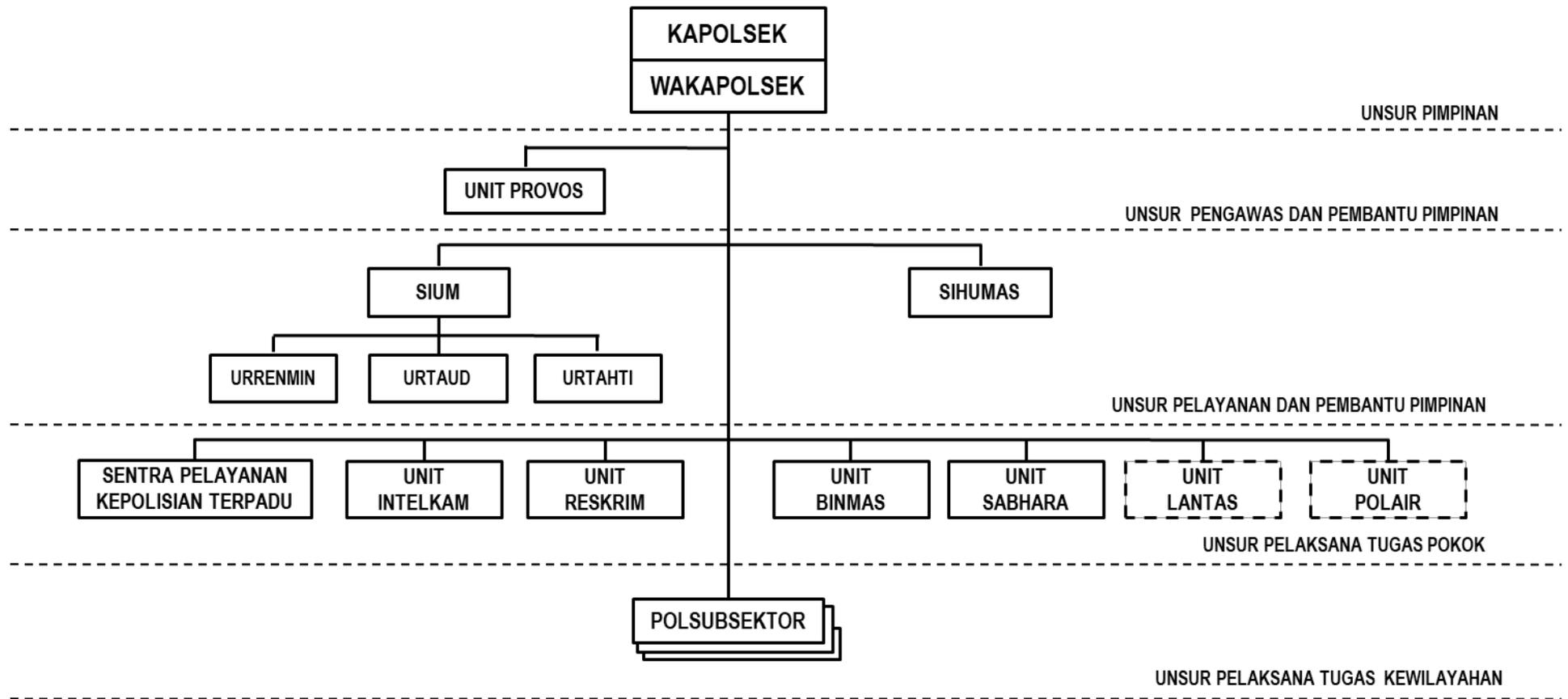
STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI POLRES (TIPE POLRES)



STRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK (TIPE RURAL)



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

TABEL SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Baseline	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT									
Stakeholder									
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Karanganyar	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Karanganyar	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
IK UTAMA									
Internal Process									
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar	IKU1	Indeks Harkamtibmas	39,75	40,61	41,47	42,62	42,65	44,04
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	90,03	90,06	90,09	90,12	90,15	90,18
IK PENUNJANG									
Innovation									
SS3	Profesionalisme SDM Polres Karanganyar	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Karanganyar	47,48	48,15	48,82	49,49	50,17	50,84

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Baseline	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
SS4	Modernisasi Teknologi Polres Karanganyar	IKP3	Persentase Pemenuhan Alkom Siap Operasional	54,21%	57,74%	62,14%	66,53%	70,92%	75,11%
		IKP4	Persentase Pemenuhan Pembangunan di Jajaran Polres Karanganyar	28,57%	28,58%	28,59%	28,60%	28,61%	28,62%
		IKP5	Modernisasi Sarana dan Prasarana Sesuai Teknologi Terkini	76,51	76,52	76,53	76,54	76,55	76,56
		IKP6	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	65,33	65,77	66,21	66,74	67,27	67,80
SS5	Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Karanganyar	IKP7	Nilai AKIP	70,46	70,81	70,91	71,01	71,11	71,21
		IKP9	Penyajian Laporan Keuangan	2	2	2	2	2	2
		IKP10	Nilai Reformasi Birokrasi	80,21	80,22	80,32	80,42	80,52	80,62
		IKP11	Indeks kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	97,53	97,59	97,65	97,71	97,77	97,83
		IKP 12	Nilai Kinerja Anggaran	95,60	95,64	95,68	95,72	95,76	95,80
		IKP 13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		IKP 14	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam. . .

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

6. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran isu strategis di wilayah hukum Polres Karanganyar bidang pertahanan dan keamanan tentang peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/Almatsus Polres Karanganyar dan peningkatan Profesionalisme personel Polres Karanganyar.

Kerangka.....

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penguatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres Karanganyar; 2. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah 3. Peningkatan pengamanan melalui penggelaran personel dan pembangunan pos-pos 4. Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap; 5. Perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNIdan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatkan keamanan melalui penguatan Polsek yang ada di Wilayah Kabupaten Karanganyar 7. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saana tindak secara rahasia, epat dan akurat; 8. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen; 9. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas; 10. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 	RM PNBP	

11. Meningkatkan...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>11. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>12. Meningkatkan kemampuan penanganan kelompok kriminal bersenjata, radikalisme, intoleransi dan terorisme melalui kegiatan preemtif dan preventif;</p> <p>13. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;</p> <p>14. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas ;</p> <p>15. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta;</p> <p>16. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;</p> <p>17. Mengembangkan TMC yang terintegrasi;</p> <p>18. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi;</p> <p>19. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas;</p>		

20. Melakukan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>20. Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;</p> <p>21. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>;</p> <p>22. Mengembangkan program <i>road safety/safety ridding</i>;</p> <p>23. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;</p> <p>24. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;</p> <p>25. melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas.</p> <p>26. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;</p> <p>27. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;</p> <p>28. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial;</p> <p>29. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel;</p>		

30. Meningkatkan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>30. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;</p> <p>31. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;</p> <p>32. Mewujudkan <i>digital security system</i> melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/Command Centre) yang terkoneksi dengan stakeholder;</p> <p>31. Mengoptimalkan <i>National Traffic Management Center</i> (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan <i>Traffic Management Center</i> (TMC);</p> <p>32. Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis <i>Internet Protocol</i> untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;</p> <p>33. Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.</p>		

2. Penegakkan...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Penegakkan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi; 2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah; 3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik; 4. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 5. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi; 6. Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya; 7. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah; 8. Mendukung kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) Polri; 9. Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana; 10. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); 	RM PNBP	

11. Mengembangkan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		11. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek; 12. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah; 13. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah		
3.	Professionalisme SDM Polres Karanganyar	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif berkualitas; 2. Mempedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender; 3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; 4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri; 5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode; 6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi; 7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i> ; 8. Melanjutkan kegiatan di <i>assessment center</i> dan aplikasinya dalam rangka pembinaan karier;	RM PNBP	

9. Mengikutsertakan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>9. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;</p> <p>10. Memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri;</p> <p>11. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;</p> <p>12. Menyeleksi dan menunjuk asesor pada setiap fungsi teknis kepolisian;</p> <p>13. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres;</p> <p>14. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>;</p> <p>15. Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres;</p> <p>16. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi</p>		

17. Menginventarisir ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
.		17. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya; 18. Menyusun standarisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja; 19. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri; 20. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polri; 21. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri; 22. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 23. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan; 24. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri; 25. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap; 26. Kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polri; 27. Memberikan keterampilan kewirausahaan kepada pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun.		
4.	Modernisasi Teknologi Polres Karanganyar	1. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiel khusus (Almatsus) Polres Karanganyar yang modern;	RM PNBP	

2. Menetapkan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselenggarakan dengan tantangan tugas; 3. Mendukung standar minimal Almatasus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri;. 4. Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum; 5. Mendukung pembangunan pusat informasi keamanan secara nasional yang terintegrasi; 6. Mendukung fasilitas kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>); 7. Mendukung pembangunan fasilitas penanganan terorisme; 8. Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (, Polres, Polsek). 9. Pembangunan laboratorium forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap; 10. Mendukung pembuatan prototipe Almatasus Polri; 11. Modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional; 12. Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan <i>database</i> kependudukan dan database informasi kriminal; 		

13. Menggelar...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		13. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas; 14. Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang sistem kepolisian; 15. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polres Karanganyar.		
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres karanganyar	1. Melaksanakan Revolusi Mental, Khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i> ; 3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian; 4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; c. penggelaran sistem BPKB online; 6. Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; 7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa; 8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana 9. Menyusun rencana kontinjensi. 10. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran.	RM PNBP	

11. Meningkatkan ...

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>11. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri;</p> <p>12. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;</p> <p>13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu;</p> <p>14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan;</p> <p>15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;</p> <p>16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i>.</p>		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Polres Karanganyar Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Karanganyar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Karanganyar dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Karanganyar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Saffung Bag Sat Sie dan personel Polres Karanganyar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Karanganyar Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan standar etika yang tinggi.
- b. melembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polres Karanganyar pada era demokratisasi khususnya pada aspek kultur terus berupaya menampilkan postur Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan antagonis;
- c. strategi *proaktif policing*, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta yang kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran;
- d. membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan berbagai pihak terus dilakukan serta implementasi strategi Polmas dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi

2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. Autentifikasi, Renstra Polres Karanganyar merupakan jabaran dari Renstra Polda Jawa Tengah dan disahkan oleh Kapolres Karanganyar;
- b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh Sاتفung dan Polsek Jajaran untuk dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Karanganyar 2 Oktober 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR




Dr. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100942